

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT PENERIMAAN PAJAK  
SEBELUM DAN SETELAH DILAKUKAN PENAGIHAN DENGAN  
SURAT PAKSA OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PALEMBANG ILIR TIMUR**



**Diajukan Oleh:  
JHONSYAH WENDRA  
NIP. 01043130005**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat  
Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Ekonomi  
2008**

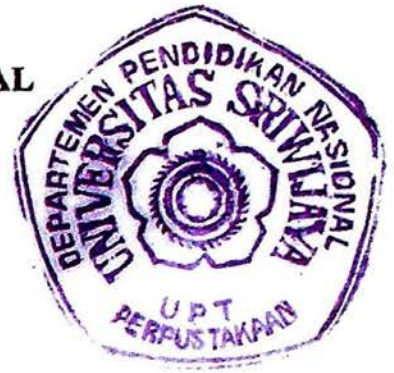
336.207

Wen

a

2008

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**



**SKRIPSI**

**ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT PENERIMAAN PAJAK  
SEBELUM DAN SETELAH DILAKUKAN PENAGIHAN DENGAN  
SURAT PAKSA OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PALEMBANG ILIR TIMUR**

16201

16563



**Diajukan Oleh:**

**JHONSYAH WENDRA**

**NIP. 01043130005**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat**

**Guna Mencapai Gelar**

**Sarjana Ekonomi**

**2008**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : JHONSYAH WENDRA  
NIM : 01043130005  
JURUSAN : AKUNTANSI  
MATA KULIAH : PERPAJAKAN  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT  
PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN SETELAH  
DILAKUKAN PENAGIHAN DENGAN SURAT  
PAKSA OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PALEMBANG ILIR TIMUR

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal

Ketua

:



Drs. Burhanudin, M,Acc, Ak  
NIP. 131801649

Tanggal

Anggota

:



Dewi Rina Komarawati, SE, Ak  
NIP. 132093577

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**

**TANDA PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF**

**NAMA : JHONSYAH WENDRA  
NIM : 01043130005  
JURUSAN : AKUNTANSI  
MAKA KULIAH : PERPAJAKAN  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT PENERIMAAN  
PAJAK SEBELUM DAN SETELAH DILAKUKAN  
PENAGIHAN OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PALEMBANG ILIR TIMUR**

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 14 Februari 2008 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian komprehensif  
Inderalaya, 14 Februari 2008

Ketua,



Drs. Burhanudin, SE, M.Acc, Ak  
NIP. 131801649

Anggota,



Dewi Rina K, SE, Ak  
NIP. 132093577

Anggota,



Abu Kosim, SE, Ak  
NIP. 132133709

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Dra. Hj. Rina Tjandrakirana DP, MM, Ak  
NIP. 131000097

**Motto :**

**Tak Ada yang Dapat memastikan Masa Depan,  
Maka Pastikanlah Langkah Mu Untuk Menjalani Masa  
Depan Mu**

**(Jhonsyah Wendra)**

**Cita-cita tanpa usaha adalah sia-sia,  
Perjuangan tanpa pengorbanan adalah mimpi,  
Mimpi menjadi kenyataan adalah suatu kebahagiaan**

**(Ali Sadikin)**

**Ku Persembahkan Kepada:**

- ❖ **Kedua Orang tua (Siwin,  
S.Pd dan Halida S.Pd)**
- ❖ **Saudara Ku (Wenny, S.Pd,  
Eva dan Wendy)**
- ❖ **My Dream (Desy Wr)**
- ❖ **Almamater**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas izinNya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini berjudul **Analisis Perbandingan Tingkat Penerimaan Pajak Sebelum dan Setelah Dilakukan Penagihan dengan Surat Paksa oleh Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur**. Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Gambaran Umum KPP Palembang Ilir Timur, Bab IV Analisis dan Pembahasan, dan Bab V Simpulan dan Saran.

Data utama yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2005-2006 penagihan dengan Surat Paksa memiliki hubungan yang erat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutang. Peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pajak.

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur dan bahan masukan akademisi bagi penelitian perpajakan.

Inderalaya, 14 Pebruari 2008

Penulis,

Jhonsyah Wendra

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah pencipta semesta alam yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Sebelum dan Setelah Dilakukan Penagihan dengan Surat Paksa oleh Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur.” Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik dukungan material maupun spiritual dalam penulisan skripsi ini, antara lain:


1. Ibu Prof. Dr.Hj. Badia Perizade, M.B.A. Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Syamsyurijal, AK. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Hj. Rina Tjandrakirana DP, SE, MM, Ak, ketua jurusan akuntansi dan pembimbing akademis.
4. Bapak Drs. Burhanudin, M,Acc, Ak, ketua pembimbing skripsi dan sekretaris jurusan akuntansi.
5. Ibu Dewi Rina Komarawati, SE, Ak, anggota pembimbing skripsi.
6. Bapak Abu Kosim, SE, Ak, sebagai dosen penguji.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
9. Kedua orang tua penulis.
10. Bapak Imron MZ Kepala Seksi Penagihan KPP Palembang Ilir Timur.
11. Seluruh sahabat jurusan akuntansi angkatan 2004.

Inderalaya, 14 Pebruari 2008

Penulis,

Jhonsyah Wendra

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Hipotesis.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.6.1 Rancangan Penelitian.....	7
1.6.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.6.3 Operasionalisasi Variabel.....	7
1.6.4 Data dan Metode Pengumpulan Data .....	8
1.6.4.1 Jenis Data.....	8
1.6.4.2 Sumber Data.....	8
1.6.4.3 Teknik Pengumpulan Data .....	9
1.6.5 Teknik Analisis Data.....	9



1.6.5.1 Teknik Deskriptif Kuantitatif.....	9
1.6.5.2 Teknik Deskriptif Kualitatif.....	13

## BAB II. LANDASAN TEORI

2.1 Sejarah Pemungutan Pajak.....	15
2.2 Dasar-dasar Perpajakan.....	16
2.2.1 Pengertian Pajak .....	16
2.2.2 Fungsi Pajak.....	17
2.2.3 Dasar Hukum Pemungutan Pajak di Indonesia .....	19
2.2.4 Dasar Teori dan Yuridikasi Pemungutan Pajak.....	20
2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	22
2.2.6 Pengelompokan Pajak.....	25
2.3 Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan.....	27
2.3.1 Surat Pemberitahuan.....	27
2.3.2 Batas Waktu Penyampaian dan Penyetoran Pajak .....	29
2.3.3 Penetapan dan Ketetapan Pajak .....	32
2.3.4 Keberatan dan Banding .....	35
2.6 Penagihan Utang Pajak .....	38
2.6.1 Penagihan Utang Pajak Sebelum Surat Paksa .....	40
2.6.2 Penagihan Utang Pajak Dengan Surat Paksa .....	42
2.6.2.1 Surat Paksa .....	42
2.6.2.2 Penerbitan Surat Paksa .....	42
2.6.2.3 Pemberitahuan Surat Paksa Oleh Juru Sita .....	44
2.6.2.4 Pelaksanaan Pemberitahuan Surat Paksa .....	45

## BAB III. GAMBARAN UMUM

3.1 Sejarah Singkat KPP Palembang Ilir Timur .....	50
--	----

3.2	Visi dan Misi .....	53
3.3	Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas .....	54
3.4	Data .....	61

#### BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1	Pengaruh Penerbitan Surat paksa terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak .....	69
4.1.1	Perhitungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak .....	69
4.1.2	Analisis Pengaruh dan Hubungan Surat Paksa terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak .....	72
4.2	Perbandingan Penerimaan Pajak Sebelum dan Setelah dilakukan Penagihan dengan Surat Paksa.....	75
4.2.1	Hasil Perhitungan .....	75
4.2.2	Pengujian Hipotesa .....	81

#### BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan .....	85
5.2	Saran .....	86

DAFTAR PUSTAKA .....	88
----------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	batas Waktu Penyampaian SPT Masa.....	29
Tabel 2.2.	Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan .....	29
Tabel 2.3.	Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak .....	30
Tabel 3.1.	Jumlah Surat Paksa yang Diterima Wajib Pajak tahun 2005 .....	63
Tabel 3.2.	Jumlah Surat Paksa yang Diterima Wajib Pajak tahun 2006 .....	63
Tabel 3.3	Jumlah Penerimaan pajak berdasarkan SPT tahun 2005 dan 2006 .....	64
Tabel 3.4.	Jumlah Penerimaan Pajak Berdasarkan STP dan SKP tahun 2005.....	65
Tabel 3.5	Jumlah Penerimaan Pajak Berdasarkan STP dan SKP tahun 2006.....	66
Tabel 3.6.	Jumlah Tunggakan pajak Berdasarkan Surat paksa Tahun 2005 .....	66
Tabel 3.7.	Jumlah Tunggakan pajak Berdasarkan Surat paksa Tahun 2006 .....	67
Tabel 4.1.	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Surat Paksa tahun 2005 .....	70
Tabel 4.2.	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Surat Paksa tahun 2006 .....	71
Tabel 4.3.	Jumlah Penerimaan Pajak Sebelum Surat Paksa.....	76
Tabel 4.4.	Jumlah Penerimaan Pajak Setelah Surat Paksa .....	77
Tabel 4.5.	Perhitungan $\sum(X_1 - X_1)^2$ .....	78
Table 4.6.	Perhitungan $(X_2 - X_2)^2$ .....	79
Tabel 4.7.	Tabel Bantu Perhitungan Korelasi .....	80

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi KPP Palembang Ilir Timur .....	55
--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Tabel nilai-nilai dalam distribusi t .....	89
Tabel nilai-nilai r product moment .....	90
Tabel bantu perhitungan korelasi .....	91

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu indikasi keberhasilan pemungutan pajak dalam suatu Negara adalah kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak terhutang yang menjadi kewajibannya tepat pada waktunya. Hal ini sangat diperlukan untuk menjamin tersediannya dana bagi negara yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam rangka ikut serta dalam pembiayaan pengeluaran negara untuk mewujudkan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan baik dari segi materil maupun segi spiritual. Keberhasilan pembangunan nasional tentunya merupakan impian seluruh warga negara termasuk warga negara Indonesia, karena dengan berhasilnya pembangunan maka kesejahteraan hidup mereka dapat lebih terjamin.

Untuk dapat merealisasikan tujuan pembangunan nasional terkait dengan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber-sumber dana berasal dari dalam negeri, salah satunya berupa pajak Pajak menurut Andiani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (Waluyo, 2000:4), adalah “iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak pembayarannya menurut

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Di Indonesia, sektor perpajakan diharapkan dapat menjadi tulang punggung penerimaan dalam negeri karena selain manfaat yang sangat besar untuk membiayai pembangunan, juga merupakan penyumbang dana terbesar untuk pembangunan. Ini bisa dilihat dari masukan dana yang berasal dari pajak yang terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi terlihat dari realisasi penerimaan pajak Januari sampai dengan Juli 2006 mencapai Rp 190,12 triliun atau naik sebesar 25 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2005. Dari realisasi penerimaan pajak tersebut, kontribusi terbesar tetap dari penerimaan pajak penghasilan non migas periode Januari sampai dengan Juli 2006, PPh menyumbang sebesar Rp 941,15 triliun atau naik 24 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (Siregar, [www.infopajak.com](http://www.infopajak.com) 12 September 2007).

Dewasa ini pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan negara untuk membiayai belanja negara. Karena pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi negara, pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak harus berdasarkan keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi para pembayar pajak. Hal ini penting agar masyarakat mau membayar pajak tanpa memandang pajak sebagai beban melainkan sebagai suatu kewajiban

kenegaraan yang harus dipenuhi sebagai anggota masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari pemerintah

Pemerintah dalam rangka reformasi perpajakan nasional berhasil melahirkan undang-undang perpajakan baru yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 juncto (jo) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, dimana dalam undang-undang tersebut terdapat pula aspek hukum dengan mencantumkan sanksi-sanksi hukum apabila wajib pajak lalai atau dengan sengaja tidak menunaikan kewajiban membayar pajak. Sebagai tidak lanjut dari reformasi perpajakan yang telah dimulai tahun 1984 tersebut, di tahun 1997 lahirlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagai pengganti undang-undang nomor 19 tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 23 Mei 1997.

Di era reformasi ini, pemerintah telah melakukan pembaharuan terhadap undang-undang perpajakan, khususnya mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Pemerintah Mengharapkan *law enforcement* dapat ditegakan di bidang perpajakan dengan pembaharuan undang-undang perpajakan di era reformasi ini. Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran, maka penagihan pajak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berlaku untuk semua jenis pajak baik itu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (seperti PPh, PPN, PBB, Bea Masuk dan Cukai, BPHPT)



maupun yang dikelola pemerintah daerah (seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan lain-lain) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa terdapat beberapa rangkaian tindakan yang dapat dilakukan Ditjen Pajak agar wajib pajak membayar utang pajaknya. Tindakan yang dimaksud antara lain menggunakan surat paksa, surat perintah pelaksanaan penyitaan, surat perintah pencegahan, surat perintah penyanderaan, sampai penjualan barang yang disita. Peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasi utang pajak sebagai mestinya (Waluyo 2000:238). Pemerintah untuk mengantisipasi kondisi tersebut, dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Ditjen Pajak untuk melakukan tindakan penagihan pajak terhadap wajib pajak. Walaupun upaya penagihan dengan surat teguran telah dilaksanakan, seringkali wajib pajak masih saja tidak membayar utang pajaknya. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, tidak seutuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Masalah yang ditemui dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa adalah:

1. Terdapatnya beberapa wajib pajak yang sengaja menghindari sehingga sulit untuk ditemui.
2. Sering kali wajib pajak sudah bangkrut (perusahaan sudah pailit).

3. Wajib Pajak tidak dapat ditemui lagi, dalam hal ini disebabkan karena wajib pajak pindah alamat tanpa ada pemberitahuan alamat yang baru kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Bertolak dari latar belakang di atas, maka penelitian ini diberi judul:

**“Analisis Perbandingan Tingkat Penerimaan Pajak Sebelum dan Setelah Dilakukan Penagihan dengan Surat Paksa oleh Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur”**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Pajak merupakan sumber penghasilan yang sangat penting, namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasi utang pajak sebagaimana mestinya. Walaupun upaya penagihan dengan surat teguran dan surat paksa telah dilaksanakan, seringkali Wajib Pajak masih saja tidak mau membayar utang pajaknya. Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh dan hubungan penerbitan surat paksa terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara penerimaan pajak sebelum dan setelah dilakukan penagihan dengan surat paksa?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Merujuk kepada latar belakang dan permasalahan yang disajikan dalam uraian terdahulu, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menghitung pengaruh dan hubungan penerbitan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan pendapatan pajak yang signifikan setelah dilakukan penagihan dengan surat paksa.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Secara empiris penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu perpajakan khususnya mengenai pengaruh peredaran surat paksa terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan pengaruh penerbitan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur.

##### **b. Manfaat Praktisi**

Secara praktisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palembang Ilir Timur mengenai efektifitas penggunaan surat paksa guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak setelah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa.

#### **1.5. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2005:82). Hipotesa dari penelitian ini adalah :

Ho : Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat penerimaan pajak sebelum dan setelah dilakukan penagihan dengan surat paksa.

Statistik parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis diatas adalah menggunakan t-test.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1 Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode studi kasus menggunakan analisis perbandingan, yaitu membandingkan suatu variabel dengan variabel lainnya yang saling berkaitan agar dapat mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan diantara keduanya.

### **1.6.2. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus mengenai tingkat penerimaan pajak sebelum dan setelah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa oleh Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur.

### **1.6.3. Operasionalisasi Variabel**

Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan dimana setiap permasalahan memiliki variabel untuk diteliti. Variabel yang akan dibahas yaitu:

#### **1. Variabel Rumusan permasalahan yang pertama:**

Variabel X : Surat Paksa yang diterima Wajib Pajak

Variabel Y : Wajib Pajak yang membayar setelah menerima surat paksa

#### **2. Variabel Rumusan permasalahan yang ke dua**

Variabel X<sub>1</sub> : Jumlah pendapatan pajak sebelum surat paksa

Variabel X<sub>2</sub> : Jumlah pendapatan pajak setelah surat paksa



#### **1.6.4. Data dan metode pengumpulan data**

##### **1.6.4.1. Berdasarkan jenis data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

###### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti (Hanafiah, 2004:11). Data primer dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung (*field research*) ke KPP Palembang Ilir Timur.

###### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data hasil penataan dan pengolahan dari pihak-pihak lain (Hanafiah, 2004:11). Data sekunder pada penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari dan membaca buku-buku yang berhubungan dengan perpajakan Indonesia.

##### **1.6.4.2. Sumber data yang digunakan**

###### **1. Penelitian lapangan**

Penelitian lapangan merupakan proses melakukan pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berwenang untuk mendapatkan data yang diteliti.

###### **2. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)**

Penelitian kepustakaan merupakan proses untuk mendapatkan dasar-dasar teori mengenai masalah yang sedang diteliti. Untuk mendapatkan dasar-dasar teori ini penulis membaca buku-buku, undang-Undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya, majalah serta tulisan ilmiah yang dapat mendukung penelitian.

### 1.6.4.3. Teknik pengumpulan data

#### 1. Dokumentasi

Mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jumlah SKP, STP, Surat Paksa yang diterbitkan KPP kepada Wajib Pajak tiap masa pajak pada tahun 2005 dan 2006 dan jumlah penerimaan pajak sebelum dan setelah dilakukan penagihan serta dokumen pendukung lainnya.

#### 2. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung yaitu peneliti secara langsung bertatap muka dengan sumber data untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

### 1.6.5. Teknik Analisis Data

#### 1.6.5.1. Teknik deskriptif kuantitatif

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap penelitian. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif. Untuk menghitung hubungan dan pengaruh surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut maka akan digunakan perhitungan regresi sederhana dan perhitungan koefisien korelasi.

Metode regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh Surat Paksa terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana : X = Surat Paksa yang diterima wajib pajak

Y = Kepatuhan (Wajib pajak yang membayar setelah menerima Surat Paksa)

a = Konstanta

b = Koefisien regresi X

Analisis korelasi untuk mengetahui hubungan antara variable independen dan variable dependen dirumuskan sebagai berikut:

$$r_{Y_1 X_1} = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\}} \sqrt{\{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Dimana :

r = Koefisien korelasi

X = Surat Paksa yang diterima wajib pajak

Y = Kepatuhan (Wajib pajak yang membayar setelah menerima Surat Paksa)

n = Jumlah bulan yang diteliti

Untuk menjawab dugaan sementara atas suatu masalah yang terjadi pada populasi yang didekati dengan data sampel maka akan dilakukan dengan menguji jawaban tentatif yang sementara apakah betul-betul terjadi pada sampel atau tidak. Kalau terjadi berarti hipotesis penelitian terbukti, dan demikian juga sebaliknya. Hipotesa ini diturunkan dari logika deduktif teoritis. Dalam pengujian hipotesa yaitu untuk mengetahui terdapat tidaknya perbedaan yang signifikan antara dua variabel tersebut maka akan dimulai dengan:

1. Penetapan hipotesa (Ho)
2. Pemilihan Test Statistik dan Perhitungan Nilai Test Statistik

Pengujian hipotesa menggunakan statistik sebagai alat bantu digunakan untuk menguji hipotesa menggunakan statistik diatas dan untuk mengetahui ada

tidaknya perbedaan antara kedua rata-rata populasi, digunakan teknik analisis parametik.

Adapun langkah-langkah dalam menghitung nilai statistik adalah sebagai berikut:

1. Menghitung varian variabel pertama dan variabel kedua dengan menggunakan rumus:

- a. Varian variabel Pertama (sebelum penagihan dengan Surat Paksa)

$$S_1 = \frac{\sum(X_1 - \bar{X}_1)^2}{n_1 - 1}$$

- b. Varian variabel kedua (setelah penagihan dengan Surat Paksa)

$$S_2 = \frac{\sum(X_2 - \bar{X}_2)^2}{n_2 - 1}$$

2. Menghitung besarnya S (simpang baku) dengan menggunakan rumus:

$$S = \frac{\sqrt{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}}{n_1 + n_2 - 2}$$

3. Menghitung koefisien korelasi dengan menggunakan rumus:

$$r_{X_1 X_2} = \frac{n \sum X_2 X_1 - (\sum X_2)(\sum X_1)}{\sqrt{\{n \sum X_2^2 - (\sum X_2)^2\}} \sqrt{\{n \sum X_1^2 - (\sum X_1)^2\}}}$$



4. Menghitung nilai t, dengan rumus:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2} - 2r \left(\frac{S_1}{\sqrt{n_1}}\right) \left(\frac{S_2}{\sqrt{n_2}}\right)}}$$

Keterangan:

t = Perbedaan nyata

X<sub>1</sub> = Pendapatan pajak sebelum Surat Paksa

X<sub>2</sub> = Pendapatan pajak setelah Surat Paksa

S<sub>1</sub> = Simpangan baku sebelum penagihan dengan Surat Paksa

S<sub>2</sub> = Simpangan baku setelah penagihan dengan Surat Paksa

S<sub>1</sub><sup>2</sup> = Varians sebelum penagihan dengan Surat Paksa

S<sub>2</sub><sup>2</sup> = Varians setelah penagihan dengan Surat Paksa

r = Korelasi antara dua sampel

n = Jumlah bulan penelitian

#### 5. Penetapan Tingkat Signifikan

Tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5% ( $\alpha = 0,05$ ) karena merupakan tingkat signifikan yang umum digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan dinilai cukup mewakili perbedaan antara variabel-variabel yang diuji. Angka  $\alpha = 0,05$  memiliki makna bila terjadi kesalahan maka kesalahan tersebut tidak lebih dari 5 %.

#### 6. Keriteria Pengambilan Keputusan

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pengujian hipotesa dengan keriteria HO diterima jika:

$$-t_{table} \leq t_{hitung} \leq t_{table}$$

#### **1.6.5.2. Teknik Deskriptif Kualitatif**

Melalui analisis kualitatif, hasil analisis kuantitatif, data yang diperoleh akan dijabarkan secara deskriptif.

#### **1.7. Sistematika Penulisan**

Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima (5) bab yang mempunyai urutan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menggambarkan kajian penelitian secara umum. Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan dari skripsi ini seperti pengertian penagihan pajak, Pelaksanaan Penagihan pajak dengan surat paksa, pajak penghasilan badan, landasan hukum, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penagihan pajak lainnya.

#### **BAB III TINJAUAN ATAS KANTOR PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR TIMUR**

Bab ini akan membicarakan mengenai deskripsi tentang kantor pelayanan pajak Palembang. Dalam hal ini akan disajikan mengenai sejarah kantor pelayanan pajak Palembang Ilir Timur, pembagian tugas dan fungsi, serta struktur organisasi dari Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil dan analisis permasalahan. Membuat deskripsi statistik, sampel penelitian variabel-variabel penelitian, hasil pengujian hipotesa. Analisis data dan interpretasi terhadap diterima atau ditolaknya hipotesa yang telah dibuat sebelumnya serta analisis atas perhitungan.

## **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dimana dalam bab ini penulis akan mengambil keputusan dari pembahasan atau analisa yang dilakukan dan kemudian penulis memberikan saran-saran yang mungkin berguna dalam praktik penerapan terhadap obyek pajak maupun subjek pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- B. Ilyas, Wirawan dan Burton. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Brotodiharjo, Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Retika Utama.
- Hanafiah. 2004. *Statistik Ekonomi*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Siahaan, Mariot P. 2004. *Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suandy, Erly. 2002. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiarto, Sergibson S. 2002. *Metode Statistika untuk Bisnis dalam ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiono. 2005. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. 2000. *Perubahan Perundang-undangan Perpajakan Era Reformasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Media Elektronik:

www. Infopajak, 12 September 2007